



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
(RENJA – SKPD)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
2023**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran I	:	Dinas Pendidikan
Lampiran II	:	Dinas Kesehatan
Lampiran III	:	RSUD Datu Sanggul
Lampiran IV	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Lampiran VI	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	:	Dinas Sosial
Lampiran X	:	Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	:	Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	:	Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	:	Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	:	Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	:	Dinas Pertanian
Lampiran XXV	:	Dinas Perdagangan
Lampiran XXVI	:	Dinas Perindustrian
Lampiran XXVII	:	Sekretariat Daerah
Lampiran XXVIII	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran XXIX	:	Kecamatan Piani
Lampiran XXX	:	Kecamatan Lokpaikat
Lampiran XXXI	:	Kecamatan Tapin Utara
Lampiran XXXII	:	Kecamatan Bakarangan
Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran XXXV	:	Kecamatan Hatungun
Lampiran XXXVI	:	Kecamatan Salam Babaris
Lampiran XXXVII	:	Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran XXXVIII	:	Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran XXXIX	:	Kecamatan Binuang
Lampiran XL	:	Kecamatan Bungur
Lampiran XLI	:	Inspektorat

- Lampiran XLII : Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Lampiran XLIII : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XLIV : Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XLV : Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Juli 2023

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 21

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tapin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Tapin.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tapin No. 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

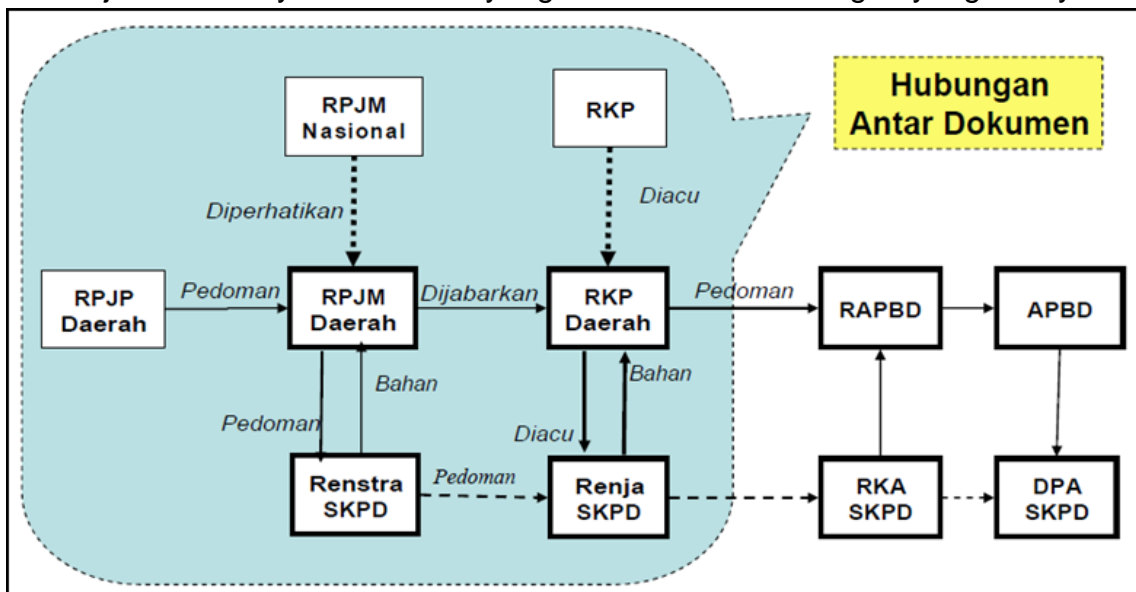
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 SOPD Inspektorat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender DI Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarustamaan Gender;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
 25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
 26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;
 27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan dari penyusunan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Inspektorat;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Inspektorat;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SOPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Inspektorat dan Kabupaten Tapin tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.



BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2024-2=2022) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

Nihil

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Nihil



Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin
Triwulan IV Tahun 2022

No	Kode Anggaran	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output))	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket												
				5	7	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11	13 = 127 x 100	14 = 6-12	15 = 145 x 100																		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17										
URUSAN PENDAMPINGAN URUSAN PEMERINTAHAN																																			
INSPEKTORAT DAERAH																																			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	%	10.499.057.832	100	%	10.499.057.832	100,00	%	869.208.041	100,00	%	3.536.654.566	100,00	%	6.860.365.394	100,00	%	9.892.217.011	100,00	%	9.892.217.011	100,00	94,22	100,00	%	9.892.217.011	100,00	94,22	TU		
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB	BB	Predikat	12.956.700	BB	Predikat	12.956.700	Predikat		Predikat		BB	Predikat				2.922.000	BB	Predikat	2.922.000	100,00	22,55	BB	Predikat	2.922.000	100,00	22,55	Sekr			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	1.000.900	2	Dok	1.000.900	Dok		Dok		2	Dok			394.000	2	Dok	394.000	100,00	39,36	2	Dok	394.000	100,00	39,36	Prog			
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.000.000	Dok		Dok		1	Dok			484.000	1	Dok	484.000	100,00	48,40	1	Dok	484.000	100,00	48,40	Prog			
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.000.000	Dok		Dok	1	Dok				374.000	1	Dok	374.000	100,00	37,40	1	Dok	374.000	100,00	37,40	Prog			
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.000.000	Dok		Dok		1	Dok			544.000	1	Dok	544.000	100,00	54,40	1	Dok	544.000	100,00	54,40	TU			
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.000.000	Dok		Dok	1	Dok				388.000	1	Dok	388.000	100,00	38,80	1	Dok	388.000	100,00	38,80	TU			
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2	Lap	6.856.900	2	Lap	6.856.900	1	Lap		Lap		1	Lap			642.000	2	Lap	642.000	100,00	9,36	2	Lap	642.000	100,00	9,36	Evlap		
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Lap	1.098.900	4	Lap	1.098.900	1	Lap		Lap	2	Lap				96.000	4	Lap	96.000	100,00	8,74	4	Lap	96.000	100,00	8,74	Evlap		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						100,00	22,55			100,00	22,55								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						ST	SR			ST	SR								
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	7.571.273.532	12	Bln	7.571.273.532	3	Bln	567.834.678	6	Bln	2.616.379.824	9	Bln	5.617.469.839	12	Bln	7.520.792.145	12	Bln	7.520.792.145	100,00	99,33	12,00	Bln	7.520.792.145	100,00	99,33	TU	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Org	7.567.273.532	40	Org	7.567.273.532	39	Org	567.834.678	40	Org	2.616.379.824	40	Org	5.617.469.839	40	Org	7.516.828.945	40	Org	7.516.828.945	100,00	99,33	40,00	Org	7.516.828.945	100,00	99,33	TU
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	Lap	2.000.000	1	Lap	2.000.000	1	Lap		Lap					Lap	1.975.600	1	Lap	1.975.600	100,00	98,78	1,00	Lap	1.975.600	100,00	98,78	TU		
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.000.000		Dok		Dok	1	Dok				1.987.600	1	Dok	1.987.600	100,00	99,38	1,00	Dok	1.987.600	100,00	99,38	TU		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						100,00	99,33			100,00	99,33								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						ST	ST			ST	ST								

6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu ketersediaan administrasi kepegawaian	12	Bln	219.435.400	12	Bln	219.435.400	3	Bln	3.874.000	6	Bln	3.874.000	9	Bln	23.424.000	12	Bln	55.125.000	12	Bln	55.125.000	100,00	25,12	12	Bln	55.125.000	100,00	25,12	TU	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Org	71.500.000	40	Org	71.500.000	39	Org	3.874.000	40	Org	3.874.000	40	Org	18.774.000	40	Org	40.923.000	40	Org	40.923.000	100,00	57,23	40	Org	40.923.000	100,00	57,23	TU
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Org	147.935.400	40	Org	147.935.400	39	Org		40	Org		40	Org	4.650.000	40	Org	14.202.000	40	Org	14.202.000	100,00	9,60	40	Org	14.202.000	100,00	9,60	TU
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	25,12			100,00	25,12				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	SR			ST	SR				
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%	1.984.787.800	100	%	1.984.787.800	100	%	259.923.164	100	%	805.487.058	100	%	1.085.860.250	100	%	1.872.181.415	100	%	1.872.181.415	100,00	94,33	100,00	%	1.872.181.415	100,00	94,33	TU	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	19.189.800	2	Paket	19.189.800		Paket	521.500		Paket	595.500	1	Paket	595.500	1	Paket	2.730.500	2	Paket	2.730.500	100,00	14,23	2	Paket	2.730.500	100,00	14,23	TU
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	94.551.000	12	Paket	94.551.000	3	Paket	5.164.098	6	Paket	19.078.215	9	Paket	37.145.385	12	Paket	62.474.551	12	Paket	62.474.551	100,00	66,07	12	Paket	62.474.551	100,00	66,07	TU
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	119.890.500	12	Paket	119.890.500	3	Paket	15.164.250	6	Paket	33.916.250	9	Paket	52.873.550	12	Paket	115.266.950	12	Paket	115.266.950	100,00	96,14	12	Paket	115.266.950	100,00	96,14	TU
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	36.328.500	12	Paket	36.328.500	3	Paket	3.706.900	6	Paket	10.805.500	9	Paket	14.486.700	12	Paket	36.315.800	12	Paket	36.315.800	100,00	99,97	12	Paket	36.315.800	100,00	99,97	TU
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	26.000.000	12	Lap	26.000.000	3	Lap	1.140.000	6	Lap	3.496.000	9	Lap	7.251.000	12	Lap	24.319.300	12	Lap	24.319.300	100,00	93,54	12	Lap	24.319.300	100,00	93,54	TU
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	1.688.828.000	12	Lap	1.688.828.000	3	Lap	234.226.416	6	Lap	737.595.593	9	Lap	973.508.115	12	Lap	1.631.074.314	12	Lap	1.631.074.314	100,00	96,58	12	Lap	1.631.074.314	100,00	96,58	TU
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	94,33			100,00	94,33				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	ST			ST	ST				
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100	%	255.000.000	100	%	255.000.000		%			%			%			100	%	171.448.000	100	%	171.448.000,00	100,00	67,23	100	%	171.448.000,00	100,00	67,23	TU
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	34	Unit	255.000.000	34	Unit	255.000.000		Unit			Unit			Unit		26	Unit	171.448.000	26	Unit	171.448.000,00	76,47	67,23	26	Unit	171.448.000,00	76,47	67,23	TU
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	67,23			100,00	67,23				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	S			ST	S				
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	162.924.800	100	%	162.924.800	100	%	25.303.309	100	%	54.269.457	100	%	67.507.011	100	%	136.363.962	100	%	136.363.962	100,00	83,70	100	%	136.363.962	100,00	83,70	TU	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	99.724.800	12	Lap	99.724.800	3	Lap	18.103.309	6	Lap	36.269.457	9	Lap	42.307.011	12	Lap	78.163.962	12	Lap	78.163.962	100,00	78,38	12	Lap	78.163.962	100,00	78,38	TU
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	63.200.000	12	Lap	63.200.000	3	Lap	7.200.000	6	Lap	18.000.000	9	Lap	25.200.000	12	Lap	58.200.000	12	Lap	58.200.000	100,00	92,09	12	Lap	58.200.000	100,00	92,09	TU
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	83,70			100,00	83,70				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	T			ST	T				
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bln	292.679.600	12	Bln	292.679.600	3	Bln	12.272.890	6	Bln	56.644.227	9	Bln	66.104.294	12	Bln	133.384.489	12	Bln	133.384.489	100,00	45,57	12	Bln	133.384.489	100,00	45,57	TU	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	62.928.200	1	Unit	62.928.200	1	Unit	3.234.400	1	Unit	16.719.620	1	Unit	18.211.370	1	Unit	38.224.320	1	Unit	38.224.320	100,00	60,74	12	Unit	38.224.320	100,00	60,74	TU
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya	10	Unit	122.818.700	10	Unit	122.818.700	3	Unit	3.570.490	6	Unit	24.605.207	7	Unit	30.920.024	10	Unit	59.004.269	10	Unit	59.004.269	100,00	48,04	10	Unit	59.004.269	100,00	48,04	TU
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	70.400.000	80	Unit	70.400.000	20	Unit	2.684.000	25	Unit	9.268.600	30	Unit	10.922.100	35	Unit	27.490.600	35	Unit	27.490.600	43,75	39,05	35	Unit	27.490.600	43,75	39,05	TU
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	36.532.700	1	Unit	36.532.700	1	Unit	2.784.000	1	Unit	6.050.800	1	Unit	6.050.800	1	Unit	8.665.300	1	Unit	8.665.300	100,00	23,72	1	Unit	8.665.300	100,00	23,72	TU
																								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	45,57			100,00	45,57				
																								Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	SR			ST	SR				
																								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	94,22			100,00	94,22				
																								Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST			ST	ST				

6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas APiP Inspektorat	3	Level	857.752.300	3	Level	857.752.300	Level	1.800.000	Level	61.952.000	3	Level	169.002.500	2	Level	361.808.100	2	Level	361.808.100	66,67	42,18	2	Level	361.808.100	66,67	42,18	Sekretaris
					Capaian nilai monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95	Nilai MCP		95	Nilai MCP		Nilai MCP		Nilai MCP	36,14	Nilai MCP		36,14	Nilai MCP		36,14	Nilai MCP		38,04		36,14	Nilai MCP		38,04		Irbn	
					Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	11	Unit		11	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit					Unit				Irbn	
					Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi	2,3	Nilai RB Pengawasan		2,3	Nilai RB Pengawasan		Nilai RB Pengawasan		Nilai RB Pengawasan		Nilai RB Pengawasan	1,74	Nilai RB Pengawasan		1,74	Nilai RB Pengawasan		58,80		1,74	Nilai RB Pengawasan		58,80		Irbn		
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APiP minimal level 3	3	Level	57.812.100	3	Level	57.812.100	Level		Level	3	Level	7.200.000			18.794.500	3	Level	18.794.500	100,00	32,51	3	Level	18.794.500	100,00	32,51	Sekretaris	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	56.383.600	1	Rekomendasi	56.383.600	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	7.200.000	1	Rekomendasi	17.527.500	1	Rekomendasi	17.527.500	100,00	31,09	1	Rekomendasi	17.527.500	100,00	31,09	Evlap	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1.428.500	1	Rekomendasi	1.428.500	Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		1	Rekomendasi	1.267.000	1	Rekomendasi	1.267.000	100,00	88,69	1	Rekomendasi	1.267.000	100,00	88,69	TU
																							Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	32,51			100,00	32,51		
																							Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	SR			ST	SR		
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian area intervensi MCP	100	%	799.940.200	100	%	799.940.200	%	1.800.000	%	61.952.000	36,14	%	161.802.500	100	%	343.013.600	100	%	343.013.600	100,00	42,88	100,00	%	343.013.600	100,00	42,88	Irbn
					Persentase SKPD yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat minimal WBK	100	%		100	%		%		%			%														Irbn	
					Persentase capaian area penguatan pengawasan	100	%		100	%		%	68,06	%		%		68,06	%		68,06	%		68,06		68,06	%		68,06		Irbn	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Perangkat Daerah	190.890.000	53	Perangkat Daerah	190.890.000	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	3.600.000	53	Perangkat Daerah	12.126.000	53	Perangkat Daerah	12.126.000	100,00	6,35	53	Perangkat Daerah	12.126.000	100,00	6,35	Irbn
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Perangkat Daerah	198.880.000	53	Perangkat Daerah	198.880.000	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	33.742.000	10	Perangkat Daerah	40.342.000	10	Perangkat Daerah	40.342.000	18,87	20,28	10	Perangkat Daerah	40.342.000	18,87	20,28	Irbn
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	410.170.200	5	Keg	410.170.200	1	Keg	1.800.000	2	Keg	61952000	5	Keg	124.460.500	5	Keg	290.545.600	100,00	70,84	5	Keg	290.545.600	100,00	70,84	Irbn
																							Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100,00	70,84			100,00	70,84		
																							Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	S			ST	S		
																							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		53,61	42,18			53,61	42,18		
																							Predikat Kinerja Kegiatan		R	SR			R	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								16.162.792.332		1.185.361.441		4.627.652.466		8.335.508.794		13.106.406.411		13.106.406.411		96,53	81,09		96,53	81,09		96,53	81,09		96,53	81,09		
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST	T			ST	T		
																							PREDKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST	T			ST	T		

6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang memadai dan sesuai dengan SAP	100	%	4.080.130.340	100	%	4.080.130.340	100	%	391.918.040	100	%	960.145.820	100	%	960.145.820	100,00	23,53	100	%	960.145.820	100,00	23,53	Irbn
							Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang handal terkait pengelolaan manajemen kas dan persediaan dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah	100	%		100	%		100	%		100	%		100,00			100	%		100,00			Irbn	
							Persentase predikat saki SKPD minimal A	100	%		100	%			%			%								%				Irbn
							Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	4	Nilai		4	Nilai			Nilai			Nilai								Nilai			Irbn	
							Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 4	4	Level		4	Level			Level		3	Level					75,00		3	Level		75,00	Irbn	
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100	%	2.832.977.740	100	%	2.832.977.740	73,33	%	277.650.000	78,60	%	648.589.300	78,60	%	648.589.300	78,60	22,89	78,60	%	648.589.300	78,60	22,89	Irbn
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23	Lap	738.214.000	23	Lap	738.214.000		Lap	21.600.000	5	Lap	79.210.000	5	Lap	79.210.000	21,74	10,73	3	Lap	79.210.000	21,74	10,73	Irbn
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15	Lap	719.980.800	15	Lap	719.980.800	1	Lap	113.640.000	19	Lap	231.540.000	19	Lap	231.540.000	126,67	32,16	19	Lap	231.540.000	126,67	32,16	Irbn
6	01	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18	Lap	388.472.480	18	Lap	388.472.480	1	Lap	44.230.000	3	Lap	64.010.000	3	Lap	64.010.000	16,67	16,48	3	Lap	64.010.000	16,67	16,48	Irbn
6	01	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Lap	76.199.230	2	Lap	76.199.230		Lap		2	Lap	27.479.700	2	Lap	27.479.700	100,00	36,06	2	Lap	27.479.700	100,00	36,06	Irbn
6	01	02	2.01	05		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	Lap	519.382.200	12	Lap	519.382.200	12	Lap	81.980.000	15	Lap	194.299.600	15	Lap	194.299.600	125,00	37,41	15	Lap	194.299.600	125,00	37,41	Irbn
6	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48	Dok	390.729.030	48	Dok	390.729.030		Dok	16.200.000	15	Dok	52.050.000	15	Dok	52.050.000	31,25	13,32	15	Dok	52.050.000	31,25	13,32	Evlap
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		78,60	22,89			78,60	22,89	
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan		T	SR			T	SR	
6	01	02	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	%	1.247.152.600	100	%	1.247.152.600	100	%	114.268.040	100	%	311.556.520	100	%	311.556.520	100,00	24,98	100,00	%	311.556.520	100,00	24,98	Irbn
6	01	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	234.391.650	1	Lap	234.391.650		Lap		1	Lap	37.350.000	1	Lap	37.350.000	100,00	15,93	1	Lap	37.350.000	100,00	15,93	Irbn
6	01	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4	Lap	1.012.760.950	4	Lap	1.012.760.950	1	Lap	114.268.040	6	Lap	274.206.520	6	Lap	274.206.520	150,00	27,08	6	Lap	274.206.520	150,00	27,08	Irbn
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		125,00	23,53			125,00	23,53	
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	SR			ST	SR	
																						Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		89,30	23,53			89,30	23,53	
																						Predikat Kinerja Kegiatan		T	SR			T	SR	

6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian area intervensi MCP	100	%	1.156.021.343	100	%	1.156.021.343	100	%	203.000	100	%	62.709.000							100	Level	62.709.000	100,00	5,42	100	Level	62.709.000	100,00	5,42	Sekretaris
					Persentase SKPD yang mengualitas predikat WBK hingga TPN	100	%		100	%			%			%									Nilai MCP		0,00	0	Nilai MCP		0,00		Irbn	
					Persentase capaian area penguatan pengawasan	100	%		100	%			%			%									Unit				Unit				Irbn	
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	%	28.290.873	100	%	28.290.873		%			%									Level	-	0,00	0	Level	-	0,00	0,00	Sekretaris	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	26.777.008	1	Rekomendasi	26.777.008		Rekomendasi			Rekomendasi								Rekomendasi	-	0,00	0,00	0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	Evap
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1.513.865	1	Rekomendasi	1.513.865		Rekomendasi			Rekomendasi								Rekomendasi	-	0,00	0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	TU	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								0,00	0,00					0,00	0,00			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR					SR	SR			
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti	100	%	1.127.730.470	100	%	1.127.730.470		%	203.000		%	62.709.000							%	62.709.000	5,56	0	%	62.709.000	0	5,56	Irbn		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Perangkat Daerah	179.563.560	53	Perangkat Daerah	179.563.560		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah								Perangkat Daerah		0,00		Perangkat Daerah	0	100,00	0,00	Irbn	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Perangkat Daerah	232.555.540	53	Perangkat Daerah	232.555.540		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah								Perangkat Daerah		0,00	0,00	0	Perangkat Daerah	0	0,00	0,00	Irbn
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	592.037.990	5	Keg	592.037.990	1	Keg	203.000	1	Keg	62.709.000						1	Keg	62.709.000	20,00	10,59	1	Keg	62.709.000	20,00	10,59	Irbn
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peregakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peregakan Integritas	53	Perangkat Daerah	123.573.380	53	Perangkat Daerah	123.573.380		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah								Perangkat Daerah				Perangkat Daerah				Irbn	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								5,00	5,56					5,00	5,56			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR					SR	SR			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								0,00	5,42					0,00	5,42			
Predikat Kinerja Kegiatan																								SR	SR					SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								17.037.496.522		3.047.276.583			6.490.485.072					6.490.685.072								52,77	38,10		52,77	38,10				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								R	SR					R	SR			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								R	SR					R	SR			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Inspektorat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Inspektorat. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat
Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	Realisasi 2023-2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Indeks Manajemen Risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	Realisasi 2023-2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP	Inspektur
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	LHP Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP	Inspektur
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Risiko	Hasil Indeks Penerapan Manajemen Risiko oleh BPKP	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP	Inspektur
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP	LHE SAKIP oleh APIP	Inspektur
	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP	LHE SAKIP oleh APIP	Sekretaris
		Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP	LHE SAKIP oleh APIP	Sekretaris
		Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP	LHE SAKIP oleh APIP	Sekretaris
		Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Inspektorat oleh APIP	LHE SAKIP oleh APIP	Sekretaris

Capaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	100%
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%	95.55%	95.55%
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	BB	B	80%
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3	Level 3	100%
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	66.66%
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95	85,18	89,66%
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	11	0	0%
		Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	2.3	1.47	63.91%
Rata-rata capaian sasaran strategis					74.47%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;



2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan;
5. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan Rancangan Akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



REVIEW TERHADAP RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	14.473.251.215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	14.473.251.215	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Persentase ketersediaan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	3.095.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Persentase ketersediaan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	3.095.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	525.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	525.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	525.000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	265.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	265.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	265.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	265.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	525.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	525.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	525.000	

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	465.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	465.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	10.465.309.644	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapin	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	10.465.309.644	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	10.387.473.644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	10.387.473.644	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	65.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	65.200.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.664.000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3.308.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3.308.000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	4.664.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	4.664.000	

III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapin	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	1.239.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapin	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	1.239.000	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.239.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.239.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapin	Persentase aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	100	538.905.340	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapin	Persentase aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	100	538.905.340	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54	65.563.620	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54	65.563.620	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40	65.678.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40	65.678.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	185.081.860	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	185.081.860	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	222.581.860	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	222.581.860	

V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	2.277.240.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	2.277.240.602
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	41.860.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	41.860.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	146.270.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	146.270.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	11.409.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	11.409.200
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	197.326.873	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	197.326.873
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	62.098.974	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	62.098.974
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8.040.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.810.235.555	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.810.235.555

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100	349.135.413	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100	349.135.413
1	Pengadaan Mebel	Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	90.242.973	Pengadaan Mebel	Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	90.242.973
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	258.892.440	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	258.892.440
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	381.198.229	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	381.198.229
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	297.844.986	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	297.844.986
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	83.353.243	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	83.353.243
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	457.127.987	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	457.127.987

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	122.964.184	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	122.964.184	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	183.999.123	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	183.999.123	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	83.486.964	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	83.486.964	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	66.677.716	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	66.677.716	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tapin	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100	4.117.251.060	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tapin	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100	4.117.251.060	
			Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	3				Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	3		

1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tapin	Persentase laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan pemeriksaan tepat waktu	100	2.117.251.060	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tapin	Persentase laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan pemeriksaan tepat waktu	100	2.117.251.060	
			Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (<i>mandatory</i>) yang direviu	100			Tapin	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (<i>mandatory</i>) yang direviu	100		
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	681.955.220	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	681.955.220	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	719.169.050	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	719.169.050	
3	Reviu Laporan Kinerja	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	390.021.930	Reviu Laporan Kinerja	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	390.021.930	
4	Reviu Laporan Keuangan	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	76.002.000	Reviu Laporan Keuangan	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	76.002.000	
5	Pengawasan Desa	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1	474.450.930	Pengawasan Desa	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1	474.450.930	

6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	393.351.930	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	393.351.930	
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	1.382.300.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	1.382.300.000	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	368.186.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tapin	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	368.186.000	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	1.014.114.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	1.014.114.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tapin	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100	1.165.225.223	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tapin	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100	1.165.225.223	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Persentase jumlah rancangan produk hukum	100	31.670.903	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Persentase jumlah rancangan produk hukum	100	31.670.903	

			yang terselesaikan					yang terselesaikan			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	29.435.530	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	29.435.530	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	2.235.373	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	2.235.373	
II	Pendampingan dan Asistensi	Tapin	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	1.133.554.320	Pendampingan dan Asistensi	Tapin	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	1.133.554.320	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	149.503.860	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	149.503.860	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	53	224.190.300	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	53	224.190.300	

			Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tapin	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	634.969.400	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tapin	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	634.969.400	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	124.890.760	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	124.890.760	
					19.755.727.498					19.755.727.498	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten XYZ

Nama SOPD: SOPD XXX

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2016-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;



3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Inspektorat selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (Impac)	Kondisi Awal		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah		Indeks Maturitas SPIP	3,067	-	3,2	3,3	3,4
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	2,80	-	3	3	3
		Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Kapabilitas APIP	2,71	-	3	3	3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat		Nilai SAKIP Inspektorat	71,35	-	73	74	75
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Perencanaan Kinerja	23,10	-	25	26	27
			Pengukuran Kinerja	21,00	-	23	24	25
			Pelaporan Kinerja	10,50	-	12	13	14
			Evaluasi Internal	16,75	-	18	19	20

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah



- c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
10. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
12. Pendampingan dan Asistensi
- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat TAHUN 2024

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						19.755.727.498,00							-	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						19.755.727.498,00							-	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (%) Rata-rata capain kinerja kegiatan Sekretariat (Nilai)					14.473.251.215,00							-	Inspektorat
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (%)					3.095.000,00							-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	2.00	525.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	525.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	525.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	265.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	265.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						525.000,00							-	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		0.00	0.00	12.00	8.040.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12.00	1.810.235.555,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik (%)				100	349.135.413,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)					100		-	Inspektorat
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	10.00	90.242.973,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		-	Inspektorat
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	20.00	258.892.440,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		-	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100	381.198.229,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)					100		-	Inspektorat
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12.00	297.844.986,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		-	Inspektorat
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12.00	83.353.243,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		-	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Bulan)				12	457.127.987,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)					12		-	Inspektorat
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		0.00	0.00	1.00	122.964.184,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		-	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	10.00	183.999.123,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	70.00	83.486.964,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0.00	0.00	1.00	66.677.716,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00	-	Inspektorat
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (%) Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP (Nilai)				100 3,6	4.117.251.060,00							-	Inspektorat
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen risiko (%) Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu (%)				100 100	2.734.951.060,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN) (Kab Tapin, KAB. TAPIN)					100 100	-	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		0.00	0.00	13.00	681.955.220,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		0.00	0.00	2.00	719.169.050,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		0.00	0.00	2.00	390.021.930,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		0.00	0.00	2.00	76.002.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		0.00	0.00	1.00	474.450.930,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		0.00	0.00	2.00	393.351.930,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu (%)				100	1.382.300.000,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)					100	-	Inspektorat
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)		0.00	0.00	12.00	368.186.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		0.00	0.00	12	1.014.114.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00	-	Inspektorat
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Level)				3	1.165.225.223,00							-	Inspektorat
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						31.670.903,00							-	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum (%)				100	29.435.530,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)							
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		0.00	0.00	1.00	29.435.530,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00		- Inspektorat
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		0.00	0.00	1.00	2.235.373,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00		- Inspektorat
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi (%)				100	1.133.554.320,00	(Kab Tapin, KAB. TAPIN)							- Inspektorat
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		0.00	0.00	53.00	149.503.860,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00		- Inspektorat
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		0.00	0.00	53.00	224.190.300,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00		- Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		0.00	0.00	5.00	634.969.400,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN	0.00		- Inspektorat
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						124.890.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					- Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)</i>		0.00	0.00	53.00	124.890.760,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0.00		
J U M L A H								19.755.727.498,00							-	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.473.251.215
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.095.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	525.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	525.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	265.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	265.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	525.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	465.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.465.309.644
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.387.473.644
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.200.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.664.000
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.308.000
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.664.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.239.000



1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.239.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	538.905.340
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.563.620
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.678.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	185.081.860
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222.581.860
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.277.240.602
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.860.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.270.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.409.200
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.326.873
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.098.974
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.040.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.810.235.555
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	349.135.413
1	Pengadaan Mebel	90.242.973
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.892.440
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.198.229
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.844.986
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.353.243
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.127.987
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.964.184
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.999.123
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.486.964
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.677.716
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.117.251.060
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.117.251.060
2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	681.955.220
3	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	719.169.050
4	Reviu Laporan Kinerja	390.021.930
5	Reviu Laporan Keuangan	76.002.000
6	Pengawasan Desa	474.450.930



7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	393.351.930
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.382.300.000
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	368.186.000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.014.114.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.165.225.223
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	31.670.903
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	29.435.530
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.235.373
II	Pendampingan dan Asistensi	1.133.554.320
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	149.503.860
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	224.190.300
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	634.969.400
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	124.890.760
		19.755.727.498



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.


BUPATI TAPIN
M. ARIFIN ARPAN

